

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH LAMPAU SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN AGAMA BATANG

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



oleh :

MUKHAMMAD KHAERUL EFFENDI

042111144

**JURUSAN AL - AKHWAL AL -SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008

Drs. Taufik, M. H.
Perum Griya Lestari B VIII/8
Tambakaji Ngaliyan Semarang

Drs. Saekhu, M. H.
Rt 03 Rw 02 Krasak
Pecangan Jepara

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Syari'ah

Hal : Naskah Skripsi

Semarang

An.Sdr. M. Khaerul Effendi

Kepada Yth

Dekan Fakultas

IAIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Khaerul Effendi

NIM / Jurusan : 042111144 / AS

Judul : EFEKTIVITAS EKSEKUSI NAFKAH LAMPAU SETELAH
PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI
PENGADILAN AGAMA BATANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Taufik, M. H.
NIP. 150 263 036

Drs. Saekhu, M. H.
NIP. 150 268 217

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M. Khaerul Effendi
NIM : 042111144
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : EFEKTIVITAS EKSEKUSI NAFKAH LAMPAU
SETELAH
PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI
PENGADILAN AGAMA BATANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

14 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008

	Semarang , 14 Juni 2008
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

DR. H. Muhibbin, M. Ag
NIP. 150 231 368

DR. H. Abu Hapsin, MA
NIP. 150 238 432

Penguji I

Penguji II

Drs. Gufron Ajib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Drs. Noor Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Taufik, M. H.
NIP. 150 263 036

Drs. Saekhu, M. H.
NIP. 150 268 217

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS. Ar-Ruum: 21).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juli 2008

Penulis

M.Khaerul Effendi
NIM. 042111144

ABSTRAKSI

M. Khaerul Effendi, NIM : 042111144 atas bimbingan Drs. Taufik, M. H. dan Drs. Saekhu, M. H., telah melakukan penelitian dengan judul : Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nafkah Lampau Setelah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Agama Batang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sorotan miring masyarakat terhadap dunia peradilan dimana peradilan dinilai telah gagal dalam menegakkan benteng keadilan yang sangat didambakan adanya oleh masyarakat khususnya dalam hal pelaksanaan putusan nafkah lampau pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Batang serta mengungkap dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektif dan tidak efektif pelaksanaan putusan tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah berkas perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan nafkah lampau pada Pengadilan Agama Batang serta tokoh masyarakat yang kemudian diambil sampelnya, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah putusan nafkah lampau (berkas perkara) wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaani putusan nafkah lampau yang berkekuatan hukum tetap tidak efektif, hal ini dipengaruhi oleh faktor biaya, budaya hukum, pengetahuan hukum masyarakat, sarana prasarana pada Pengadilan Agama Batang Dan keadaan ekonomi para pencari keadilan.

Kontribusi dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi penegak hukum (Hakim, Panitera, Jurusita) di Pengadilan Agama Batang serta pencari keadilan dalam melaksanakan eksekusi serta mengeliminir faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya eksekusi pada Pengadilan Agama Batang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrhim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Dengan limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa cahaya kebenaran bagi umat di dunia dan akhirat.

Untuk sampai pada tahapan ini banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan, demikian pula telah banyak bantuan serta motivasi yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. Taufik, M. H. dan Bapak Drs. Saekhu, M. H., selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberi restu dan do'a nya dalam setiap langkah perjuangan penulis untuk menggapai cita-cita.
6. Kekasihku yang selalu memberikankasih sayang, doa, dorongan semangat seta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kakak, Adik dan keluarga yang telah memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku
9. Teman-temanku seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfa'at khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya Amin.

Semarang, 01 Juli 2008

Penulis

M.Khaerul Effendi
NIM. 042111144

PERSEMBAHAN

Dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang yang dekat dihati, yang telah memberikan semangat baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menghadapi segala rintangan, tantangan dan cobaan selama penulis hidup di kampus sehingga terselesaikan skripsi ini, antara lain :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta, berkat do'a restumu serta kasih sayang yang tiada tara, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di dunia dan akhirat.
- Calon istriku yang tercinta Armyn Sutriana yang selalu memberikan kasih sayangnya, doa, dorongan semangat serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini.
- Kakak-kakak dan Adikku yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan untuk mencapai kesuksesan ini. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT.
- Keponakanku semoga menjadi anak yang soleh-sholehah, berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama.
- Sahabat-sahabatku (Bangun, Ph, Wa2n, Faizin, Agus, Doel), Teman-teman koz Graha Bonen (Birin, Topik, Udin, Waiz, Taqin, Ata, Iip, Yubi...dll), teman koz baru (Karyo, Umam, Hajir, Pak Ndut, Lihun, Ucheh, Gepeng,

Fathi), Temen-temen seperjuangan Anas, Faruq,Koko, Naim, Sinox, Khalida, Rosidah dll.

Dan akhirnya semua itu akan punya arti, karenanya ku persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DEKLARASI.....	
MOTTO	
ABSTRAKSI.....	
KATA PENGANTAR.....	
PERSEMBAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penulisan	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Penegakan Hukum	16
B. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Nafkah	21
C. Pengertian dan Macam-Macam serta Kekuatan Putusan	33
D. Pengertian dan Macam-Macam eksekusi serta Tatacara eksekusi Riil.....	48

BAB III : PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH LAMPAU DI PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Batang	59
B. Putusan yang Berkaitan dengan Eksekusi Nafkah Lampau ...	63
C. Pelaksanaan Putusan Nafkah Lampau	65
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nafkah Lampau.....	66

BAB IV : ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH LAMPAU SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

A. Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan putusan nafkah Lampau	74
B. Analisis terhadap factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	90
C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga peradilan agama dari peradilan semu (*Quasi rechtspraak*) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam tata hukum di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan lain.¹

Lembaga peradilan yang mandiri (*court of law*) mempunyai ciri antara lain :

- 1 Tertibnya administrasi peradilan, baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial.
- 2 Penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 3 Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu eksekusi dapat di eksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut,

¹ Abdul Manan, *Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan agama*, Jakarta: Al – Hikmah, 2000, hal 1

sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum²

Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa tentang :

- a. Anak dalam kandungan
- b. Kelahiran
- c. Pemeliharaan anak
- d. Perkawinan
- e. Hak dan kewajiban suami istri
- f. Harta perkawinan
- g. Perceraian
- h. Pemeliharaan orang tua
- i. Kematian
- j. Kewarisan wasiat, hibah, wakaf, shadaqah³

Dengan lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006 membawa perubahan terhadap tugas dan wewenang Pengadilan Agama dari pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yaitu di bidang perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan shadaqah⁴.

² *Ibid* , Hal. 2

³ Drs. H.A. Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet VI, hal 2

⁴ Ahmad fauzan, SH.,LLM, *Himpunan undang-undang lengkap tentang badan peradilan*, Bandung: Yrama Widya, 2004, hal 221

Sedangkan pasal 49 ayat (1) Undang –undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama (UUPA) menegaskan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a Perkawinan
- b Waris
- c Wasiat
- d Hibah
- e Wakaf
- f Zakat
- g Infaq
- h Shadaqah
- i Ekonomi Syari'ah⁵

Apabila dipahami secara cermat rumusan kata-kata “menyelesaikan dalam pasal 49 ayat (1) UUPA tersebut diatas maknanya termasuk, mengeksekusi putusan sampai tuntas.

Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, kecuali terhadap putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) dan putusan provisi (provisional). Adapun putusan yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan yang bersifat condemnatoir artinya mengandung suatu penghukuman sebab putusan-putusan yang bersifat

⁵Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 (1)

deklaratoir dan konstitutif tidak memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya, mengingat begitu putusan-putusan pemaksa yang amarnya deklaratoir atau konstitutif diucapkan maka keadaan yang dinyatakan sah telah mulai berlaku saat itu ataupun keadaan baru sudah tercipta seketika itu juga.⁶

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*exekutoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh ketua Pengadilan.⁷

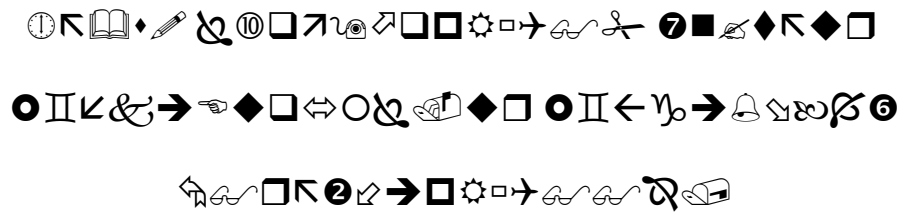
Putusan Pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 435 jo. pasal 57 ayat (1) undang-undang no 7 tahun 1989)⁸.

Salah satu diantara beberapa eksekusi adalah tentang nafkah lampau. Kaum muslimin sepakat bahwa, Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kerabat. Nafkah terhadap isteri ditetapkan dalam *nash-nya* dalam surat berikut ini :

⁶ M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, *Cet II*, hal 309

⁷ Abdul Manan, *Op. Cit*, hal 185

⁸ Prof. Dr . Sudikno Mertokusumo, S. H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, *Cet I*, hal 184



Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..." (Al Baqarah ayat: 233)

Yang dimaksud para ibu disitu adalah istri-istri sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi :

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak¹⁰

Pengadilan Agama Batang dalam menerima perkara rata-rata pertahun 1000 (seribu) perkara lebih, berangkat banyaknya perkara peneliti tertarik untuk meneliti perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batang yang kaitannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengandung eksekusi nafkah lampau yaitu salah satu dari banyaknya eksekusi yang harus dilaksanakan yaitu tentang hak asuh anak (hadlanah), pembagian harta bersama (gono-gini), pembagian harta warisan dan lain-lain. Dari putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengandung eksekusi

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hal. 400

¹⁰ Instruksi Presiden RI No. 1 Th. 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2000, hal.15

nafkah lampau banyak masalah-masalah yang ditemui dilapangan yaitu biaya eksekusi yang terlalu tinggi dan lamanya pelaksanaan eksekusi sehingga hal tersebut tidak efektif serta tidak dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan ketidakadilan ditengah masyarakat

Fenomena diatas tidak sesuai dengan asas peradilan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut : “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”¹¹

Dalam kaitan biaya ringan sering menimbulkan polemik bagi pencari keadilan dimana pihak yang memenangkan perkara sering kali mengeluarkan biaya yang tinggi dan tidak sebanding dengan barang eksekusinya.

Berdasarkan pengamatan sementara terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengandung eksekusi nafkah lampau yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi tidak di eksekusi.

Dengan demikian ada kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yang memberi peluang terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat. Adapun akibat terjadinya kesenjangan itu dapat menimbulkan gejala kurang baik di masyarakat bahkan dapat mengancam keselamatan para aparat Pengadilan Agama Batang.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi mengenai efektivitas eksekusi nafkah lampau setelah putusan

¹¹ Ahmad fauzan, SH.,LLM, *Op. Cit*, hal 12

berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Batang serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan eksekusi nafkah lampau tersebut.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai judul dari pembahasan skripsi di atas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah pada :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Batang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Batang.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Batang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat di dalam penulisan yang penulis tulis diantaranya:

- 1 Sebagai masukan (*input*) bagi aparat Pengadilan agama Batang khususnya dan masyarakat umumnya bagi evaluasi program dan peningkatan efektivitas eksekusi putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2 Dengan mengetahui hambatan-hambatan penyebab eksekusi putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap akan dapat memberikan masukan dalam rangka eksekusi yang lebih proporsional dan profesional.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau, sejauh yang penulis ketahui belum pernah ada yang meneliti. Beberapa penelitian tentang nafkah pernah dilakukan, tetapi tidak membahas tentang efektivitas pelaksanaannya. Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang nafkah adalah sebagai berikut :

Habib Nawawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya "Ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir sebagai alasan perceraian (Studi komparatif pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm)" mengkaji tentang alasan perceraian karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir menurut pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm kemudian membandingkan pendapat keduanya.

Salbiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya "Study Analisis Pendapat Imam Syafi'I tentang tidak wajib

nafkah selain tempat tinggal terhadap istri yang di talak ba'in kubro" Yaitu mengkaji tentang Pendapat Imam Syafi'I yang tidak mewajibkan nafkah selain tempat tinggal terhadap istri yang di talak ba'in kubro.

Umami Nadlirotus Sa'adah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya "Analisis terhadap pendapat Imam Hambali tentang tidak adanya hak nafkah dalam Islam (analisis pasal 3 huruf b uu no. 23 tahun 2004 tentang KDRT)" yaitu mengkaji tentang pendapat Imam Hambali tentang tidak adanya hak nafkah dalam Islam dikaitkan dengan pasal 3 huruf b UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Mahuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya "Nafkah atas istri yang di talak ba'in dalam keadaan tidak hamil (studi komparasi pendapat Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah) yaitu mengkaji tentang Nafkah atas istri yang di talak ba'in dalam keadaan tidak hamil menurut pendapat Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah kemudian membandingkan pendapat keduanya.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, penelitian penulis berbeda karena penulis menganalisa tentang efektivitas eksekusi nafkah lampau. Dari sinilah penulis melihat signifikansi penulisan skripsi ini. Arah penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau setelah berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga organisasi masyarakat (*social*) maupun lembaga pemerintahan.¹²

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Batang dan juga dengan orang yang berperkara di Pengadilan agama Batang yang Putusannya mengandung eksekusi nafkah lampau.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan¹³

a. Populasi

¹² Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, hal. 31

¹³ Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-11, 1998, hal. 114

Populasi Adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pengadilan Agama Batang yang lingkup kerjanya terkait langsung dengan eksekusi putusan nafkah lampau, seperti pimpinan Pengadilan, para hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, sera pencari keadilan yang pernah berperkara pada Pengadilan Agama Batang yang putusannya mengandung eksekusi nafkah lampau.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁵

Teknik pemilihan Sampel dalam pengambilan data empiris, peneliti menggunakan “*Quota Sampling*”¹⁶ yaitu dengan cara terlebih dahulu menetapkan dan menentukan jumlah orang dari Aparat Pengadilan Agama Batang serta pencari keadilan yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Batang yang putusannya mengandung eksekusi nafkah lampau.

Berdasarkan jumlah strata yang telah ditentukan dan orang-orang yang pernah berperkara diharapkan dapat mewakili seluruh populasi

¹⁴ Bambang Sunggono, SH, MS. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006, hal 118

¹⁵ *Ibid*, hal 119

¹⁶ Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Op. Cit*, hal 119

atau sebagian warga masyarakat pencari keadilan di Batang. Karena penetapan pemilihan sampel dalam hal ini keterwakilan populasi tidak dipermasalahkan selama penentuan jumlah sampel atau responden yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.¹⁷

Tanpa klasifikasi atau pengelompokan jenis karakteristik populasi pengedar kuesioner dilakukan dengan memeriksa identitas pihak-pihak yang pernah berperkara menurut dari sumber dan dokumen putusan hakim Pengadilan, atau dimana saja kemungkinan dapat ditemui.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subjek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, lengger, agenda dan sebagainya¹⁸

Penulis mengumpulkan data-data dari buku-buku yang terkait dan berkas-berkas perkara Pengadilan Agama Batang yang putusannya mengandung eksekusi nafkah lampau.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal 59

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, Hal. 87

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.¹⁹

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.²⁰

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa kalangan pejabat Pengadilan Agama Batang dan juga mengedarkan angket (daftar pertanyaan) kepada pimpinan Pengadilan, para hakim, panitera, jurusita serta para berperkara yang putusannya mengandung eksekusi nafkah lampau.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif dibuktikan dengan pemakaian teknik uji distribusi frekuensi dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus²¹ :

¹⁹ Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Op. Cit*, hal. 205

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hal. 39

$$P = f/n \times 100\%$$

P = Presentase

f = frekuensi

n = Jumlah responden

100 % = Bilangan peneliti

G. Sistematika penulisan skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Dalam bab dua ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai efektivitas penegakan hukum, pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun nafkah, pengertian dan macam-macam serta kekuatan putusan dan pengertian dan macam-macam eksekusi serta tata cara eksekusi riil.
- BAB III** : Dalam bab ini akan dikemukakan pelaksanaan putusan nafkah lampau setelah berkekuatan hukum tetap yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Batang putusan yang berkaitan dengan eksekusi nafkah lampau, pelaksanaan putusan nafkah

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal 268

lampau dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau.

- BAB IV** : Dalam bab ini dilakukan analisa terhadap efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang berisikan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau.
- BAB V** : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Penegakan Hukum

Putusan hakim adalah hukum (judge made law). Oleh karena itu sebagaimana hukum pada umumnya, harus ditaati dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pada putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, terutama para pihak yang berperkara.¹

Menurut Achmad Ali ada perbedaan antara hukum diproduksi oleh legeslatif dalam wujud undang-undangan dengan hukum yang dibuat oleh hakim. Hukum dalam wujud undang-undang mengikat secara umum, sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja.²

Lebih lanjut Achmad Ali mengatakan bahwa baik hukum undang-undang maupun putusan hakim mempunyai kelebihan dan kekurangan. Undang-undang kelebihannya lebih menjamin kepastian hukum, dan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya tentu lebih rendah dibanding undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang.³

Wujud hukum sebagai suatu kaidah adalah unsur sanksi eksternal, sebagaimana dikatakan oleh Leopold Pospisil dan Max Weber. Adanya sanksi (ancaman paksa) atas pelanggaran hukum pada dasarnya agar si pelaku pelanggaran jera untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, dan

¹ Sudikno Merokusumo, *Op. Cit* , hal 4

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Permata, 1996, hal 205.

³ *Ibid*, hal 205

dilain pihak menjadi perhatian bagi yang lainnya bahwa melakukan pelanggaran hukum ada sanksinya.⁴

Menurut Satjipto Raharjo, orang mematuhi hukum karena :

- a. Kepatuhan tersebut dipaksa oleh sanksi (teori paksaan).
- b. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan untuk mereka (teori persetujuan).⁵

Ukuran untuk menentukan bahwa hukum itu efektif adalah ditaatinya atau tidak hukum tersebut oleh masyarakat.⁶

Disamping ketaatan untuk mengukur efektif tidaknya suatu aturan adalah kesadaran hukum. Krabbe memberikan definisi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁷

Tampak ada yang dikatakan oleh krabbe menggambarkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa akan menaati suatu peraturan. Digambarkan oleh Achmad Ali yaitu kesadaran seseorang bahwa mencuri itu adalah salah atau jahat, belum tentu orang tersebut tidak melakukan pencurian⁸. Untuk itu sangat tepat apa yang

⁴ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1990, hal 184

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hal 155.

⁶ Achmad Ali, *Menjelajahi Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998, hal 193

⁷ *Ibid*, hal 192

⁸ *Ibid*, hal 192

dikatakan oleh Usman P. Tampubolon bahwa keefektifan suatu hukum tergantung kepada respon publik atau aktor kebudayaan⁹.

Dengan demikian efektif tidaknya eksekusi putusan yang dijatuhkan oleh hakim tergantung kepada kesadaran dan ketaatan hukum oleh yang bersangkutan.

Substansi putusan hakim juga harus dipertimbangkan. Menurut Achmad Ali bahwa putusan hakim tidak dapat dilihat dari yuridis formal saja, melainkan harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak otonom dan berdasarkan pada berbagai aktor non hukum. Oleh karena itu para hakim benar-benar memperhatikan kondisi masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan dengan kata lain putusan hakim harus membumi dalam arti sejajar dengan kepentingan masyarakatnya. Bila hakim dalam memutus perkara memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian niscaya putusan hakim akan efektif dan sebaliknya bila putusan hakim tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, tentu putusannya tidak akan berjalan efektif¹⁰.

Manusia dan moral menurut Satjipto Raharjo merupakan aktor potokm dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945, kalau boleh memilih demikian penjelasan Undang-undang Dasar, Negara hukum Indonesia lebih memilih manusia diatas undang-undang. Menurut Satjipto Raharjo undang-undang boleh kurang baik, tetapi itu tidak

⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal 135

¹⁰ Achmad Ali, *Op. Cit*, hal 205-207

menjadi halangan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera manakala manusia-manusia yang menegakkan hukum tersebut baik¹¹.

Bertolak dan berpegangan pada penegakan hukum yang bermoral menurut Satjipto Raharjo akan lahir butir-butir patokan untuk bertindak bagi para penegak hukum yaitu :

- a. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan hukum semata.
- b. Kreatifitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan daripada sekedar logika.
- c. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk mencapai keadilan.
- d. Penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan komitmen dan empati¹²

Mengenai efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekamto ada lima yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan antara kelima itu saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada penegakan hukum.

Adapun kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut¹³ :

1. Faktor hukum

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal 45

¹²

¹³ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hal 8-9

Suatu peraturan berlaku secara yuridis adalah penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu peraturan berlaku secara sosiologis bila peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa ditujukan atau diberlakukan. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum.

Peraturan hukum yang mati atau dirasakan sebagai suatu tirani karena tidak berakar pada hati sanubari masyarakat secara menyeluruh¹⁴.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan lain-lainnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum.

Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan

¹⁴Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 173

berjalan lancar, dan penegakan hukum tidak akan mungkin dalam menjalankan peranannya. Sarana atau atau fasilitas yang baik, peralatan yang memadai, keuangan cukup dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahnya penegakan peraturan tersebut. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut¹⁵.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

B. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab (نفاق), artinya yaitu membelanjakan. Sedangkan nafkah berasal dari kata *nafaqa*

¹⁵ *Ibid*, hal 181

(نفق-ينفق), yang artinya nafkah, barang yang dibelanjakan.¹⁶ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata al-infaq, yang berarti keluar dan pergi.¹⁷

Sedangkan menurut bahasa Indonesia, nafkah mempunyai pengertian sebagai berikut :¹⁸

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan.
- 2) Rizki, makanan sehari-hari.
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri.
- 4) Uang pendapatan, mencari rizki belanja dan sebagainya untuk mencari biaya hidup, suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.

Menurut para fuqoha, sebagaimana Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan, bahwa pengertian nafkah adalah mengeluarkannya seseorang ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu, dan sebagainya.¹⁹

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983, hal. 463

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1976, hal. 482

¹⁸ Departemen P dan K., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hal. 965

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 483

النفقة هنا توفير وما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن خدمة ود

حاء وان كانت غنية

Artinya : "*Pengertian nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya*".²⁰

Sedangkan menurut al-Asqolani yaitu sebagai berikut :

النفقة للمرد بها الشئ الذي يبدل له الانسان فيها يحتا به هو او

غيره من الطعام والشرب وغيرهما

Artinya : "*Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan manusia untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan minuman*".²¹

Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.²² Sedangkan menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, pengertian nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik dan di belanjakan untuk orang menjamin tanggung-jawabnya.²³

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Beirut : Daar al-Fikr, 1968, hal. 85

²¹ Muhammad bin Ismail al-Asqalani, *Subul al-Salam*, Juz. III, Semarang : Maktabah Toha Putera, t.th., hal. 218

²² R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th., hal. 76

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, Cet. I, 1996, hal. 1281

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan masalah nafkah pada pasal 80 ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung :

- 1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan.²⁴

Dari beberapa pengertian nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

b. Dasar Hukum Nafkah

Agama Islam diturunkan ke bumi sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber utama, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dan sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan Islam sebagai agama samawi yaitu memiliki kitab suci Al-Qur'an. Sebagai sumber utama, tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

²⁴ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hal. 150

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum, diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah.

Adapun dalil dari nash Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban nafkah adalah diantaranya sebagai berikut :

وَعَلَى الْاِمْلُوْد لَهُ رَزْقِهِنَّ وَكْسُوْتِهِنَّ بِاَمْعُرُوفٍ لَا تَكْلِفُ نَفْسٍ اِلَّا
وَسْعَهَا (البقرة : 233)

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah : 233)*²⁵

Sedangkan rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup. Kiswah artinya pakaian. Sedangkan arti bi al-Ma'ruf adalah yang sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.²⁶

Pada ayat yang lain dalam surat at-Thalaq ayat 6, juga dijelaskan tentang kewajiban nafkah atas isteri bagi suami. Sebagaimana firman Allah :

اَسْكُنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوْهُنَّ لَتَضْحِكْنَ
عَلَيْهِنَّ وَانْ كُنَّ اَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²⁵ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* , Semarang : CV. Al-Waah, t.th., hal. 57

²⁶ Abdul Hamid Krisik, *Keluarga Sakiah* , Jakarta : Mizan al-Bayan, t.th., hal. 198

(الطَّلَاق : 6)

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin".*
(Q.S. al-Thalaq : 6)²⁷

Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan kewajiban nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan orang miskin, karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki tiap orang menurut kadar dan keadaannya.

Lain dari itu, Allah juga mengingatkan akan hak-hak terhadap kerabat yang secara langsung adalah merupakan perluasan dari sistem kekeluargaan dengan firmanNya, antara lain :

قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِيتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

(البقرة : 210)

Artinya : *"Jawablah : apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". (Q.S. al-Baqarah : 215)*²⁸

Dan Allah SWT. berfirman :

وَاتِ ذَا الْأَقْرَبِ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا تَدْبِرِ الْبُيُوتَ

(الاسراء : 26)

Artinya : *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang dalam*

²⁷ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hal. 946

²⁸ *Ibid.*, hal. 52

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. al-Isra' : 26)²⁹

Adapun Hujjahnya menurut sunnah adalah :

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل

شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم

فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه بجارى و مسلم)

Artinya : "Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti Utsbah pernah bertanya : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik ". (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri yang kebetulan suaminya kikir, maka ia boleh mengambil harta suaminya secukupnya untuk kebutuhan pokok sehari-harinya.³¹

Selain itu, juga dalam hadis diterangkan :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم دينا را نفقته فى سبيل الله ودينا را نفقته فى رقة ودينا را

تصدّقت به على مسكين ودينا را نفقته على اهلك اعظمها اجرا

الذى ا نفقته ا هلك

(رواه احمد و مسلم)

²⁹ Ibid., hal. 428

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. IV, Indonesia Maktabah Dahlan, t.th., hal. 2218

³¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989, hal. 104

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : " Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu". (HR. Ahmad dan Muslim)*³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b disebutkan sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2) : "Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

ayat (4) : "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) kiswah dan tempat tinggal, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".³³

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Pasal 45 ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".³⁴

³² Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th., hal. 424

³³ Depag. RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit.*, hal. 150

³⁴ UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 1974, hal. 1

Demikian syari'at Islam dan undang-undang dengan jelas telah menerangkan tentang dasar wajibnya nafkah. Sebagai undang-undang dan pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Syarat dan Rukun Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu. Namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajibnya memberikan nafkah dan hak menerima nafkah adalah sesuai dengan faktor penyebab adanya nafkah, yaitu:

- 1) Karena adanya perkawinan, syaratnya³⁵ adalah :
 - a) Adanya akad perkawinan
 - b) Isteri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami
 - c) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya

Seorang isteri selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 dan 84³⁶, yaitu :

³⁵Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* , hal. 148

³⁶Abdurrahman, *Op.Cit.* , hal. 134

Pasal 83 yang berbunyi :

- a) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 yang berbunyi :

Kewajiban nafkah suami terhadap isteri itu bisa gugur atau hilang, jika isteri melakukan nusyuz. Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan nusyuz antara lain; isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak melakukan hubungan intim dengan suami tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, atau isteri meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau ijin dari suami.³⁷

- 2) Karena adanya hubungan kerabat, syarat-syarat kewajiban memberikan nafkah antara lain ³⁸:
 - a) Adanya kekeluargaan yang menyebabkan saling mewarisi antara yang memerlukan dan yang kaya.
 - b) Adanya kebutuhan (keperluan) terhadap nafkah, jadi jika kita tidak memerlukan lagi, maka tidak ada kewajiban nafkah.

³⁷Sayyid Sabiq, *Hak Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 67

³⁸Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hal. 177-178

- c) Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah orang yang mampu.
- d) Adanya persamaan agama.

Adapun orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah adalah kerabat yang tidak punya harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya.

Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama, kemungkinan yang terjadi adalah

- a) Jika seseorang memunyai ayah, ibu, dan anak, maka dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan hadist :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت و ملك لابيک

Artinya : *"Bersabda Rasulullah : "Engkau dan harta engkau adalah milik bapak engkau".³⁹*

Jika seseorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan hadist :

³⁹M. Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syahiyyah* , Beirut: Daar al-Ilmiah, t.th., hal. 117-118

وعن طارق المحاربي رضى الله عنه قال : قد منا المدينة فا
 ذارسول الله صلى الله عليه وسلم : قائم على المنبر يخطب ا
 لناس وهو يقول : يد المعطى العليا وبد ا بمن تقول : امك
 واباك واختك ثم ادناك وادناك (رواه مختصر)

Artinya : "*Dari Thariq al-Muharabi semoga Allah meridhoinya, ia berkata : "Aku datang dari Madinah, maka apabila Rasulullah berkhotbah beliau berkata : "Tangan memberi lebih mulia dan mulialah orang yang lebih berhak engkau beri nafkah, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara perempuan engkau, dan saudara laki-laki engkau kemudian yang agak dekat dan yang agak dekat denganmu". (HR. Nasa'i dan ibn Hiban)*"⁴⁰

Dari hadist di atas dapat dipahami, jika dua orang kerabat mempunyai tingkat derajat yang sama, maka kerabat yang wanita didahulukan dari kerabat laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk ushul, maka urutannya setelah orang tua.

- b) Setelah kerabat furu' dan ushul, kemudian yang wajib diberi nafkah adalah kerabat hawsy.

Hawsy yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping sesuai dengan hadist di atas maka yang didahulukan adalah saudara perempuan kemudian saudara laki-laki, bibi, paman, dan seterusnya.

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, semisal

⁴⁰Jalaluddin as-Suyuti, *Sunan Nasa'I Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al- Ilmiah, t.th., hal.

berupa gandum (nasi), lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal.⁴¹ Sebab hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari kekurangan. Dan besarnya nafkah diukur sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya.⁴²

Adapun rukun nafkah ada tiga, yaitu :

- 1) Adanya orang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang lazim disebut munfaq (منفق)
- 2) Adanya orang yang menerima nafkah yang lazim disebut munfaq 'alaih (منفق عليه)
- 3) Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah yang lazim disebut (منفق فيه)

C. Pengertian, macam-macam, dan kekuatan putusan

a. Pengertian

Menurut sudikno mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁴³

⁴¹Departemen Agama RI., *Ilmu Fiqh*, hal. 201

⁴²M. Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, hal. 116

⁴³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 175

Menurut Andi Hamzah, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masalah-masalah yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.⁴⁴

Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil penulisan pemeriksaan perkara gugatan.⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan adalah hasil pemeriksaan, setelah dipertimbangkan masalah-masalah yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

b. Macam-Macam Putusan

1. Dilihat dari segi sifatnya⁴⁶

a) Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan Pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan secara sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang pengangkatan anak. Tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.

⁴⁴ Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Op. Cit*, hal 173.

⁴⁵ Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Op. Cit*, hal 245

⁴⁶ Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Op. Cit*, hal 177-178

Putusan declaratoir biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegas saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.

b) Putusan Constitutif

Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan dan lain-lain.

Dalam putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum yang baru. Sebagai contoh amar putusan constitutif biasanya berbunyi sebagai berikut “Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena.....”

c) Putusan Comdenatoir

Putusan Comdenatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata

penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka sidang Pengadilan. Dalam Putusan Comdenatoir ada pembenaran hak tergugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.

Hak terhadap suatu prestasi yang dituntutnya oleh hakim di benarkan, serta ditetapkan dalam putusan yang bersifat comdenatoir. Terhadap hal itu dapat dilaksanakan secara paksa (*forcelijk executie*). Dalam putusan yang bersifat comdenatoir , amar putusan harus mengandung kalimat berikut :

- 1) Menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu.
 - 2) Menghukum tergugat untuk tidak berbuat sesuatu.
 - 3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu.
 - 4) Menghukum tergugat untuk membongkar sesuatu.
 - 5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang.
 - 6) Menghukum tergugat untuk mengosongkan.
 - 7) Menghukum tergugat untuk membagi.
2. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 macam yaitu ⁴⁷:
- a) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap

⁴⁷ Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Op. Cit*, hal 253-255

pemeriksaan di persidangan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

b) Putusan Sela (pasal 185 HIR atau pasal 196 RBg)

Putusan sela adalah putusan yang jatuh masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela selalu harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta di tandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.

Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecali bersama-sama dengan putusan akhir pasal 201 RBg atau pasal 9 ayat (10) UU No. 20 / 1947).Rv. Mengenal beberapa nama putusan sela, yaitu :

- 1) Putusan Praeparatoir yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh

terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Contoh :
Putusan tentang penggabungan perkara, penolakan pengunduran pemeriksaan saksi.

Hal ini menurut HIR/RBg tidak perlu dibuat putusan sela tetapi cukup dicatat saja. Dalam berita acara sidang.

- 2) Putusan Interlocutoir yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan di tempat dan sebagainya.

Hal ini merupakan HIR cukup dicatat dalam BAP saja, kecuali tentang penetapan sumpah seperti tersebut di atas.

- 3) Putusan Insidentil yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara. Contoh : putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang dan gugat insidentil.

- 4) Putusan Provisional yaitu putusan sela yang menjawab gugat provisional.

3. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak saat putusan dijatuhkan⁴⁸

- a) Putusan Gugur (pasal 124 HIR/ pasal 148 RBg)

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon

⁴⁸ *Ibid*, hal 255-258

tidak hadir. Putusan gugur dapat dijatuhkan pada sidang pertama atau sidang sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan.

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1) Penggugat atau pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- 2) Pengugat atau pemohon ternyata hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- 3) Tergugat atau termohon hadir dalam sidang.
- 4) Tergugat atau termohon mohon keputusan.
- 5) Penggugat atau pemohon adalah tunggal.

Dalam hal penggugat atau pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur, penggugat atau pemohon dihukum membayar perkara. Terhadap perkara inia dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.

b) Putusan Verstek (pasal 125 HIR atau pasal 149 RBg)

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi.

Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR, pasal 196-197 HIR, pasal 148-153 RBg, pasal 207-208 RBg, UU No 20 tahun 1947 dan SEMA No. 9 tahun 1964.

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan dan sebelum tahap jawaban tergugat sepanjang tergugat atau para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu :

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- 4) Penggugat hadir di persidangan.
- 5) Penggugat mohon keputusan.

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan kesemuanya tidak hadir dalam sidang, maka dapat diputus pula dengan verstek. Putusan verstek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil secara kebenaran dalil-dalil gugat. Apabila itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat. Sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam hal perkara verstek.

Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan verstek, maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan dalam perkara (pasal 8 UU No. 20 tahun 1947).

Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) dengan alat-alat bukti yang cukup, sebelum menjatuhkan putusan verstek. Apabila tergugat mengajukan verzet maka putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Perlawanan (verzet) ini

berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan atau pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi apabila perlawanan itu tidak diterima atau tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim dalam putusan akhir akan menguatkan putusan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktoir diisyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

4. Dilihat dari segi isinya⁴⁹

a) Tidak menerima gugatan penggugat (= negatif)

Putusan tidak menerima yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon” atau dengan kata lain “gugatan

⁴⁹ *Ibid*, hal 258-260

penggugat atau permohonan pemohon tidak terima” karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.

Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum materiil :

Misalnya : Gugatan cerai dengan alasan pasal 19.b PP No. 9 tahun 1975 yang diajukan sebelum waktu 2 tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.

Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum formil :

Misalnya : Gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan agama dan sebagainya.

Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa “gugatan penggugat tidak diterima” atau “tidak menerima gugatan penggugat”. Meskipun tidak ada eksepsi, hakim karena jabatannya dapat memutuskan “gugatan penggugat tidak diterima” jika tidak memenuhi syarat hukum tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan sesudah tahap jawaban, kecuali dalam verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai

pokok-pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat.

Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir (pasal 201 ayat 2 RBg atau pasal 9 ayat 2 UU No. 20 tahun 1947). Putusan ini termasuk putusan negatif.

b) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (= negatif)

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana dalil gugat tidak terbukti.

Putusan ini termasuk putusan negatif. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa atau diadili.

c) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya (= positif dan negatif)

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga :

- 1) Dalil gugat yang terbukti maka tuntutan dikabulkan.
 - 2) Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutan ditolak.
 - 3) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
 - 4) Putusan ini merupakan putusan campuran positif dan negatif.
- d) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (= positif)

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil-dalil gugat terbukti maka semakin kuat alasannya untuk menabulkan petitum. Prinsipnya setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat. Putusan ini merupakan putusan positif.

c. Kekuatan Putusan

- 1) Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat artinya keputusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus memenuhi putusan itu.

Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini, baik dalam arti positif (pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv). Mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res Judicata pro veritate habetur*) dan tidak dibuktikan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelum antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama = *nebis in idem* (pasal 134 Rv).

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (yaitu *Request civil dan derdent verzet*). Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (*dictum*) merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat. Sedang mengenai hasil *konstatirng* hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain sengketa tersebut masih dapat disengketakan.⁵⁰

2) Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu.

⁵⁰ Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Op. Cit*, hal 271-272

Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu (tindak pidana). Pasl 1918 dan 1919 BW. Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu.

Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama pula (*nebis in idem*).⁵¹

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut. Secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.

Putusan Pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak dapat

⁵¹ Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Op. Cit*, hal 184-185

dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 Jo. Pasal 435 Jo. 57 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989).

Hanya putusan yang bersifat comdenatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusnya yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi.⁵²

D. Pengertian dan macam-macam eksekusi, serta tata cara eksekusi riil

a. Pengertian

Menurut R. Soebekti kata “Eksekusi” berarti pelaksanaan putusan.⁵³

Sudarto mengatakan eksekusi (Indonesia) pelaksanaan putusan Pengadilan, pelaksanaan putusan hakim.⁵⁴

Jika bertitik tolak pada bab X bagian V HIR (*Herzeine Indonische Regiement*) atau title IV RBg (*Regeiment Builen Gewesten*), maka disini pengertian putusan adalah sama dengan “menjalankan putusan” (*tenu it voer legging van vannissen*) artinya melaksanakan isi putusan Pengadilan.⁵⁵

Eksekusi Adalah kata serapan dari bahasa Belanda “*Exekutie*” artinya pelaksanaan dari putusan.⁵⁶ Menurut Abdul Manan eksekusi

⁵² M. Yahya Harahap, SH, *Op. Cit*, hal 311-322

⁵³ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, tahun 1997, hal 128

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 144

⁵⁵ Retno Wulan Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal 98

⁵⁶ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Prandyna Paramita, 1987, hal 46

adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

Dari beberapa arti eksekusi tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan terhadap pihak yang salah dalam perkara yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dan proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, tiada lain dari tindakan berkesinambungan dari acara perdata.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak kepada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, disamping itu putusan Pengadilan yang mempunyai title eksekutorial dalam putusan yang bersifat atau mengandung amar “*Comdenatoir*”. Sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat *Deklaratoir* dan *Constitutif* tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.⁵⁸

Menurut Sudikno Mertikusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang

⁵⁷Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Op. Cit*, hal 187

⁵⁸M. Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 112

memutuskan perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*eksecution force*).⁵⁹

Tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan oleh putusan hakim. Hal ini menurut A. Mukti Arto dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan secara⁶⁰:

- 1) Sukarela
- 2) Paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Cara-cara eksekusi putusan Pengadilan diatur mulai dari pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg. Namun pada saat sekarang semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku efektif lagi.⁶¹ Menurut Mahkamah Agng mengenai sandera dianggap tidak sesuai lagi dengan pengakuan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1964.⁶²

Lebih lanjut menurut Yahya harahap mengemukakan prinsip-prinsip / asas eksekusi adalah sebagai berikut⁶³ :

- 1) Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- 2) Putusan tidak dijalankan secara sukarela

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal 212

⁶⁰ Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Op. Cit*, hal 305

⁶¹ M. Yahya Harahap, SH, *Op. Cit*, hal 2

⁶² Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perdata*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1987, hal

⁶³ M.Yahya Harahap, *Permasalahan dan Sita Jaminan*, Bandung: Pustaka, 1990, hal. 4

- 3) Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir.
- 4) Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan dan dijalankan oleh panitera atau jurusita.

Secara singkat kronologis eksekusi Pengadilan adalah sebagai berikut : setelah ada permohonan eksekusi dari pemohon, Ketua Pengadilan memerintahkan supaya si terhukum dipanggil untuk menghadap kepadanya untuk mendapatkan peringatan (*anmaning*) agar si terhukum melaksanakan atau memenuhi isi putusan dengan sukarela dalam jangka 8 hari.

Apabila dalam jangka waktu tersebut lewat, si terhukum belum memenuhi putusan atau ia meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap (untuk ditegur/diperingatkan), maka ketua Pengadilan mengeluarkan perintah tertulis yang berisi perintah menjalankan eksekusi dan ditujukan kepada panitera atau jurusita. Setelah panitera atau jurusita menerima perintah untuk melaksanakan eksekusi, panitera atau jurusita melaksanakan eksekusi tersebut dengan oleh dua orang saksi, eksekusi dilaksanakan di tempat obyek sengketa sebagaimana dalam amar putusan dan pelaksanaan eksekusi serta saksi-saksi menandatangani berita eksekusi.

Ketentuan eksekusi putusan merupakan bagian dari tertib hukum yang harus ditegakkan yang diatur dalam hukum acara perdata, untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan yang merupakan hakikat

penegakan hukum⁶⁴. Disamping itu tujuan eksekusi menurut Djazuli Bachar adalah untuk mangefektifkan prestasi.⁶⁵ Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.⁶⁶

Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, dan yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah adanya kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan untuk Pengadilan agama kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus ada kata “Bismillahirrahmanirrahim”. Hal ini wajar karena putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama, dasar pertimbangan hukumnya merujuk kepada ajaran syariat Islam.

Putusan Pengadilan bernilai eksekutorial yang ditentukan dalam hukum acara, apabila *dictum* putusan bersifat *condemnatoir*, yaitu berbunyi menghukum dan memerintahkan kepada pihak si terhukum untuk melakukan perbuatan.⁶⁷

b. Macam-Macam Eksekusi

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada beberapa jenis eksekusi yaitu⁶⁸ :

⁶⁴ Ibid, hal. 4-5

⁶⁵ Djazuli Bachar, *Op. Cit*, hal 20

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal 211

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 125

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal 201

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBg.
- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg, orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak dimenangkan bisa meminta kepada hakim agar kepentingan yang diperolehnya dinilai dengan uang.
- 3) Eksekusi riil, eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal 1033 Rv. Yang dimaksud eksekusi riil oleh pasal 1003 Rv adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap karena tidak memenuhi surat perintah hakim, maka akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan Negara agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi macam ini adapun diatur dalam Rv namun oleh karena dibutuhkan oleh peradilan maka lazim dipedomani.

Dalam praktek Pengadilan Agama, eksekusi pembayaran sejumlah uang menurut Abdul Manan secara singkat dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut⁶⁹ :

⁶⁹ Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Op. Cit*, hal 192

- 1) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi.
Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama sudah dikeluarkan peringatan, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan eksekusi.
- 2) Mengeluarkan Perintah Eksekusi
Proses selanjutnya adalah Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya.
- 3) Pengumuman Lelang
Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar atau mass media lainnya terhadap barang-barang yang akan dieksekusi.
- 4) Permintaan Lelang
Jika pengumuman lelang telah dilaksanakan, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual barang-barang yang telah diletakkan eksekusi.
- 5) Pendaftaran Permintaan Lelang
Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang tersebut dalam buku khusus untuk itu dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum.
- 6) Penetapan Hari Lelang
Berikutnya Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang. Ketua Pengadilan Agama boleh mengusulkan hari lelang, tetapi

sepenuhnya terserah Kantor Lelang Negara untuk menetapkan harinya.

7) Penentuan Syarat Lelang dan Floor Price

Ketua Pengadilan Agama menentukan syarat lelang, sedang kantor lelang negara yang menetapkan patokan terendah.

8) Tata Cara Penawaran

Penawaran diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama, alamat penawar dan harga serta ditandatangani oleh penawar.

9) Pembeli Lelang dan Menentukan Pemenang

Pemenang lelang adalah penawar tertinggi sesuai dengan daftar price

10) Pembayaran Harga Lelang

Pembayaran harus tunai, jika tidak dengan tunai kemudian waktu pembayaran telah ditetapkan belum juga lunas maka haknya gugur sebagai pemenang lelang.

Selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar atau memenuhi hak pemohon eksekusi.

c. Tata cara Eksekusi Riil

Berpedoman pada pasal 1033 Rv dan pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 218 ayat 2 RBg, ditambah dengan asas-asas eksekusi yang telah

diuraikan, tata cara menjalankan eksekusi riil dapat di ringkas sebagai berikut⁷⁰ :

1) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Res Judicata*)

Syarat ini merupakan prinsip untuk menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan putusan provisi. Mengenai asas ini sudah dijelaskan pada prinsip-prinsip eksekusi.

2) *Pihak* yang kalah (tergugat) tidak mau menanti dan memenuhi putusan secara sukarela.

Syarat inipun merupakan asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan Pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. Hal ini pun sudah dijelaskan pada uraian yang berkenaan dengan prinsip-prinsip eksekusi.

3) *Eksekusi* riil baru dapat dilaksanakan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan.

Sudah di jelaskan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum eksekusi secara fisik dijalankan adalah “peringatan” atau “teguran” agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 42-43

Jadi, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan yang bersangkutan memerintahkan Jurusita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan, agar menjalankan pemenuhan putusan, serta sekaligus ketua Pengadilan menentukan batas waktu pemenuhan putusan, paling lama delapan hari.

4) *Mengeluarkan* surat perintah penetapan eksekusi

Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran

Malahan kewenangan *ex officio* ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas kepada keadaan masa peringatan telah dilampaui. Akan tetapi, kewenangan mengeluarkan perintah eksekusi dapat dilakukan ketua Pengadilan apabila pihak yang kalah atau tergugat tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.

5) *Panitera* atau juru sita menjalankan perintah eksekusi riil

Proses selanjutnya setelah panitera atau jurusita ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, ia memberitahukan eksekusi kepada pihak yang kalah. Dan pada hari yang ditentukan panitera atau jurusita langsung kelapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

BAB III
PELAKSAAN PUTUSAN NAFKAH LAMPAU DI PENGADILAN
AGAMA BATANG

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Batang

1. Kadudukan Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang Secara geografis terletak di ibu kota Kabupaten Batang, yang mempunyai kewenangan yurisdiksi 12 kecamatan sewilayah Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang terletak di sebelah barat kota Semarang kurang lebih 75 km. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah barat berbatatasan dengan kabupaten Pekalongan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa¹.

Perkara yang masuk rata-rata diatas 1000 pertahun, dimana dalam setiap perkara harus diselesaikan dengan cepat dan biaya murah, namun banyak kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara, misalnya kendala biaya, pihak-pihak yang berperkara, aparat penegakan hukum itu sendiri²

¹Monografi Pengadilan Agama Batang Tahun 2008

² Hasil wawancara dengan Bapak Suhermansyah, BA selaku Panitera, 12 Juni 2008

2. Struktur Organisasi Agama Kabupaten Batang³

³Monografi Pengadilan Agama Batang tahun 2008

Dengan nama-nama hakim sebagai berikut⁴:

1. Drs. H. Badrun, SH, MSi
2. Drs. H. Ahmad Akhsin, SH
3. Dra. Hj. Zainudin istiqomah
4. Drs. H. Ahmad Taufik, SH
5. Drs. H. Achmad Anwarulchur, SH, MSi
6. Drs. H. Tjahjono
7. Drs. Shobirin, SH
8. Drs. H. Muhakam, SH
9. Drs. Abdul Manan
10. Drs. H. Mutawali, SH
11. Dra. Sri Rohmani
12. Drs. Syamsul Falah, MH
13. Dra. Ernawati

3. Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Batang

Sebagaimana telah dikemukakan pada permulaan bab ini, Pengadilan Agama Batang berkedudukan di kota Batang.

Pengadilan Agama Yang wilayahnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, letaknya Berbatasan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Kajan, dengan kompetensi relatif sebanyak 12

⁴*Op. Cit*, Bapak Suhermansyah, BA

kecamatan yang terdiri atas 313 desa dan Kelurahan⁵. Dengan jumlah penduduk 691.727 jiwa sebagaimana dirumuskan dalam tabel berikut ini:

Jumlah penduduk perkecamatan dirinci menurut jenis kelamin dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batang⁶

Nomor	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Batang	53.537	53.251	106.788
2	Tulis	32.002	35.229	67.231
3	Warungasem	23.068	23.761	46.829
4	Subah	32.400	33.462	65.862
5	Limpung	28.982	30.286	59.268
6	Gringsing	28.686	28.612	57.298
7	Bawang	24.596	24.599	49.195
8	Reban	20.475	20.627	41.102
9	Tersono	22.081	22.362	44.443
10	Bandar	35.989	34.498	70.487
11	Wonotunggal	16.887	16.901	33.788
12	Blado	25.244	24.192	49.736
	Jumlah	343.947	347.780	691.727

⁵Ibid

⁶ Monografi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2008

Adapun jenjang pendidikan 34 orang pegawai Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan Pegawai Agama Batang⁷

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD / SMP	1	
2	SLTA / Sederajat	4	
3	S1	27	
4	S2	2	
	Jumlah	34	

B. Putusan yang berkaitan dengan eksekusi nafkah lampau

1. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Batang dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 adalah sebagaimana tabel berikut⁸ :

No	Tahun	Perkara diterima	Perkara Diputus
1	2006	1086	976
2	2007	1200	1166
	Jumlah	2286	2142

⁷ Monografi Pengadilan Agama Batang tahun 2008

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis, BA, selaku Panitera muda hukum, 12 Mei 2008

2. Putusan yang Amarnya Mengandung Eksekusi Nafkah Lampau

Sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan agama, terdapat berbagai macam putusan yang amarnya menghendaki adanya tindakan eksekusi yang biasa juga disebut dengan amar yang bersifat comdenatoir.

Macam-macam putusan yang bersifat comdenatoir tersebut terjadi akibat sengketa antara lain dari gugatan harta warisan, gugatan tentang harta hibah, wakaf, gugatan tentang harta bersama, gugatan tentang penggantian biaya kehidupan yang dilalaikan suami (nafkah lampau) serta gugatan tentang biaya kehidupan anak dan lain-lain⁹.

Dari penelitian penulis di Pengadilan Agama Batang ditemukan bahwa sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2007, terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung eksekusi nafkah lampau sebanyak 70 putusan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini¹⁰ :

No.	Tahun	Jumlah Putusan yang mengandung eksekusi nafkah lampau
1	2006	33
2	2007	37
	Jumlah	70

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syamsul Falah, MH, selaku Hakim, 12 Mei 2008

¹⁰ *Op. Cit*, Bapak Abdul Azis, BA

Selanjutnya dengan adanya jumlah putusan yang mengandung eksekusi nafkah lampau sebanyak 70 putusan maka jumlah responden masing-masing pemohon eksekusi dan tereksekusi adalah 140 responden.

C. Pelaksanaan Putusan Nafkah Lampau

Pelaksanaan putusan nafkah lampau di Pengadilan Agama Batang dengan jumlah responden pemohon (yang menang) sebanyak 70 adalah sebagai berikut :

Tingkat pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut pemohon (yang menang)¹¹

No.	Tingkat Pelaksanaan	Frekuensi
1	Sukarela	35
2	Paksa	25
3	Tidak dilaksanakan	10
	Jumlah	70

Kemudian pelaksanaan putusan nafkah lampau berdasarkan jumlah responden termohon sebanyak 70 adalah sebagai berikut :

¹¹ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

Tingkat pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut termohon
(yang kalah)¹²

No.	Tingkat Pelaksanaan	Frekuensi
1	Sukarela	37
2	Paksa	23
3	Tidak dilaksanakan	10
	Jumlah	70

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau

1. Faktor Tingginya Biaya pelaksanaan

Jawaban responden pemohon putusan nafkah lampau atas biaya pelaksanaan tinggi sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebagai berikut :

Faktor tingginya biaya pelaksanaan menurut pemohon nafkah
lampau (pihak yang menang)¹³

No.	Kategori biaya tinggi	Frekuensi
1	Ya	30
2	Tidak	25
3	Tidak Tahu	15
	Jumlah	70

¹² Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

¹³ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

Jawaban responden termohon putusan nafkah lampau atas biaya pelaksanaan tinggi sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebagai berikut :

Faktor tingginya biaya pelaksanaan menurut termohon nafkah lampau (pihak yang kalah)¹⁴

No.	Kategori biaya tinggi	Frekuensi
1	Ya	40
2	Tidak	10
3	Tidak Tahu	20
	Jumlah	70

Jawaban Aparat Pengadilan Agama Batang atas biaya pelaksanaan tinggi sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebagai berikut :

Faktor tingginya biaya pelaksanaan menurut Aparat Pengadilan Agama Batang¹⁵

No.	Kategori biaya tinggi	Frekuensi
1	Ya	15
2	Tidak	5
3	Tidak Tahu	5
	Jumlah	25

¹⁴Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

¹⁵Hasil Rekapitulasi Angket Aparat Pengadilan Agama Batang

Tampak yang menjawab tidak tahu cukup banyak yaitu 5 responden aparat Pengadilan agama, ini semua disebabkan karena masalah pelaksanaan lebih banyak dikelola oleh pimpinan panitera apalagi yang menyangkut administrasi, sehingga sudah bukan merupakan pekerjaan hakim lagi.

Disamping itu karena penetapan dan penaksiran jumlah besarnya biaya pelaksanaan mutlak merupakan kebijakan pimpinan dalam hal ini ketua Pengadilan agama¹⁶.

2. Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat (Pemohon)

Pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat oleh karena itu pandangan dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut termasuk tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Pengetahuan hukum masyarakat disini adalah pencari keadilan yang perkaranya mengandung eksekusi nafkah lampau.

Menurut responden pemohon eksekusi (pihak yang menang), minimnya pengetahuan masyarakat tentang eksekusi putusan Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

¹⁶ *Op. Cit*, Bapak Drs. Syamsul Falah, MH

Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat

Menurut pemohon nafkah lampau (pihak yang menang) ¹⁷

No.	Tingkat Pengetahuan hukum Masyarakat (Pemohon Eksekusi)	Frekuensi
1	Rendah	40
2	Sedang	12
3	Tidak Tahu	18
	Jumlah	70

Menurut responden termohon (pihak yang kalah), minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat

Menurut Termohon nafkah lampau (pihak yang kalah) ¹⁸

No.	Tingkat Pengetahuan hukum Masyarakat (Pemohon)	Frekuensi
1	Rendah	38
2	Sedang	22
3	Tidak Tahu	10
	Jumlah	70

¹⁷Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

¹⁸Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

Menurut Aparat Pengadilan Agama Batang, minimnya pengetahuan masyarakat tentang eksekusi putusan Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat
Menurut Aparat Pengadilan Agama Batang ¹⁹

No.	Tingkat Pengetahuan hukum Masyarakat (Pemohon Eksekusi)	Frekuensi
1	Rendah	20
2	Sedang	3
3	Tidak Tahu	2
	Jumlah	25

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkara-perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama umumnya masalah hukum keluarga artinya sangat berkaitan dengan hubungan kekeluargaan seperti hubungan perkawinan, hukum kewarisan, hukum hibah, hukum wasiat dan sebagainya.

Maka dalam kaitannya ini budaya hukum masyarakat menentukan ketika eksekusi putusan hendak dilaksanakan misalnya budaya hukum masyarakat berupa tidak ingin merusak hubungan keluarga. Begitupun halnya dalam gugatan rekonsiliasi tentang nafkah lampau, faktor

¹⁹Hasil Rekapitulasi Angket Aparat Pengadilan Agama Batang.

budaya hukum masyarakat berupa yang penting dapat bercerai saja sudah cukup.

Menurut responden pemohon (pihak yang menang), budaya hukum setempat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

Faktor Budaya hukum setempat
menurut pemohon nafkah lampau (pihak yang menang) ²⁰

No.	Tingkat Budaya Hukum Masyarakat	Frekuensi
1	Ya	20
2	Tidak	40
3	Tidak Tahu	10
	Jumlah	70

Menurut responden termohon (pihak yang kalah), budaya hukum setempat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

²⁰Hasil Rekapitulasi Pemohon Eksekusi .

Faktor Budaya hukum setempat menurut termohon nafkah lampau
(pihak yang kalah) ²¹

No.	Tingkat Budaya Hukum Masyarakat	Frekuensi
1	Ya	20
2	Tidak	36
3	Tidak Tahu	14
	Jumlah	70

4. Faktor Penegak Hukum (Pengetahuan Hukum Aparat Pengadilan)

Menurut responden pemohon (pihak yang menang), pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

Faktor Penegak hukum menurut pemohon (pihak yang menang) ²²

No.	Tingkat Pengetahuan Aparat Pengadilan	Frekuensi
1	Ya	40
2	Tidak	25
3	Tidak Tahu	5
	Jumlah	70

²¹Hasil Rekapitulasi Tereksekusi .

²²Hasil Rekapitulasi Pemohon Eksekusi .

Menurut responden termohon (pihak yang kalah), pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau sebagai berikut :

Faktor Penegak hukum menurut termohon (pihak yang kalah) ²³

No.	Tingkat Pengetahuan Aparat Pengadilan	Frekuensi
1	Ya	38
2	Tidak	27
3	Tidak Tahu	5
	Jumlah	70

²³Hasil Rekapitulasi Tereksekusi .

BAB IV

ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN
NAFKAH LAMPAU SETELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

A. Analisis terhadap Efektivitas Pelaksanaan Putusan nafkah lampau

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji distribusi frekwensi¹ adalah sebagai berikut :

Tabel persentase perkara yang diterima dan diputus tahun 2006
sampai tahun 2007²

No.	Tahun	Perkara diterima	Perkara diputus	Persentase (%)
1	2006	1086	976	89,9
2	2007	1200	1166	97,2
	Jumlah	2286	2142	93,6

Dari tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2006 persentase perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang adalah sebesar 89,9 %. Sedangkan persentase perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang pada tahun 2007 adalah sebesar 97,2 %. Jadi Pengadilan Agama Batang menunjukan adanya peningkatan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk yaitu pada tahun 2006 sebesar 89,9 % menjadi 97,2 % pada tahun 2007.

Dari perkara yang diputus sebanyak 2142 perkara terdapat 70 perkara yang mengandung eksekusi nafkah lampau.

¹ *Op.Cit*, Soerjono Soekanto, hal 268

² *Op.Cit*, Bapak Abdul Azis, BA

Untuk jelasnya lihat tabel berikut ini³ :

No.	Tahun	Jumlah Putusan yang mengandung eksekusi nafkah lampau
1	2006	33
2	2007	37
	Jumlah	70

Selanjutnya untuk membuktikan tingkat pelaksanaan putusan nafkah lampau di Pengadilan Agama Batang dengan jumlah responden pemohon (yang menang) sebanyak 70, dengan menggunakan analisis distribusi frekwensi⁴ dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel frekuensi pelaksanaan putusan nafkah lampau dengan responden pemohon (yang menang) di Pengadilan Agama Batang⁵

No.	Tingkat Pelaksanaan	Frekuensi	Presentase
1	Sukarela	35	50
2	Paksa	25	35,7
3	Tidak Dilaksanakan	10	14,3
	Jumlah	70	100

Berdasarkan hasil data penelitian pada tabel tersebut diatas terlihat responden yang menjawab pelaksanaan putusan nafkah lampau dilaksanakan secara sukarela adalah sebesar 50 %, yang menjawab dilaksanakan secara

³ *Ibid*

⁴ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

⁵ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

paksa adalah sebesar 35,7 %, sedangkan yang menjawab tidak dilaksanakan adalah sebesar 14,3 %.

Kemudian bagaimakah tingkat pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut responden termohon yang berjumlah 70 responden ? Analisis berdasarkan uji distribusi frekwensi⁶ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pelaksanaan putusan nafkah lampau dengan responden termohon (yang kalah) di Pengadilan Agama Batang⁷

No.	Tingkat Pelaksanaan	Frekuensi	Presentase
1	Sukarela	37	52,9
2	Paksa	23	32,8
3	Tidak Dilaksanakan	10	14,3
	Jumlah	70	100

Berdasarkan hasil data penelitian pada tabel tersebut diatas terlihat responden yang menjawab pelaksanaan putusan nafkah lampau dilaksanakan secara sukarela adalah sebesar 52,9 %, yang menjawab dilaksanakan secara paksa adalah sebesar 32,8 %, sedangkan yang menjawab tidak dilaksanakan adalah sebesar 14,3 %.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari kedua belah pihak adalah hampir sama. Kedua-duanya sama-sama menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan nafkah lampau di Pengadilan Agama Batang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa

⁶ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

⁷ Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

pelaksanaan putusan nafkah lampau pada Pengadilan Agama Batang belum berjalan efektif itu terbukti masih cukup banyak eksekusi yang dijalankan secara paksa (sebesar 35,7 % dari pihak pemohon dan dari pihak termohon adalah sebesar 32,8 %) dan juga masih ada eksekusi nafkah lampau yang tidak dilaksanakan (dari pihak pemohon dan termohon adalah sebesar 14,3 %).

B. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Putusan nafkah lampau

1. Analisis terhadap Faktor Tingginya Biaya Pelaksanaan

Frekuensi tingginya biaya pelaksanaan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut pemohon yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi⁸ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi tingginya biaya pelaksanaan menurut pemohon
(pihak yang menang)⁹

No.	Kategori Biaya Tinggi	Frekuensi	Presentase
1	Ya	30	42,9
2	Tidak	25	35,7
3	Tidak Tahu	15	21,4
	Jumlah	70	100

⁸ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

⁹ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap tingginya biaya pelaksanan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan putusan nakah lampau adalah sebanyak 30 responden atau sebesar 42,9 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 25 responden atau sebesar 35,7 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 15 responden atau sebesar 21,4 %.

Frekuensi tingginya biaya pelaksanan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan putusan nafkah lampau menurut termohon (pihak yang kalah) yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi¹⁰ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi tingginya biaya pelaksanan menurut termohon
(pihak yang kalah)¹¹

No.	Kategori Biaya Tinggi	Frekuensi	Presentase
1	Ya	40	57,1
2	Tidak	10	14,3
3	Tidak Tahu	20	28,6
	Jumlah	70	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap tingginya biaya pelaksanan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 40 responden atau sebesar 57,1 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah

¹⁰ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

¹¹ Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

sebanyak 10 responden atau sebesar 14,3 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 20 responden atau sebesar 28,6 %.

Frekuensi tingginya biaya eksekusi sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut aparat Pengadilan agama yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi¹² adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi tingginya biaya pelaksanaan menurut Aparat Pengadilan Agama¹³

No.	Kategori Biaya Tinggi	Frekuensi	Presentase
1	Ya	15	60
2	Tidak	5	20
3	Tidak Tahu	5	20
	Jumlah	25	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap tingginya biaya pelaksanaan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 15 responden atau sebesar 60 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 20 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 20 %.

¹² *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

¹³ Hasil Rekapitulasi Angket Aparat Pengadilan Agama Batang

Jadi biaya pelaksanaan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan nafkah lampau terbukti. Itu semua di buktikan dari jawaban ketiga responden yang menjawab biaya eksekusi tinggi yaitu pemohon sebesar 42,9 %, termohon 57,1 %, dan dari aparat Pengadilan agama sendiri 60%.

2. Analisis terhadap Faktor Pengetahuan Hukum Masyarakat (Pemohon Eksekusi)

Frekuensi pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut pemohon yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi¹⁴ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pengetahuan hukum masyarakat menurut pemohon (pihak yang menang)¹⁵

No.	Tingkat pengetahuan hukum masyarakat (pemohon)	Frekuensi	Presentase
1	Rendah	40	57,1
2	Sedang	12	17,2
3	Tidak Tahu	18	25,7
	Jumlah	70	100

¹⁴ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

¹⁵ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab rendah terhadap pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 40 responden atau sebesar 57,1 %, sedangkan yang menjawab sedang adalah sebanyak 12 responden atau sebesar 17,2 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 18 responden atau sebesar 25,7 %.

Frekuensi pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut termohon (pihak yang kalah) yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi¹⁶ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pengetahuan hukum masyarakat menurut termohon (pihak yang kalah) ¹⁷

No.	Tingkat pengetahuan hukum masyarakat (pemohon)	Frekuensi	Presentase
1	Rendah	38	54,3
2	Sedang	22	31,4
3	Tidak Tahu	10	14,3
	Jumlah	70	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab rendah terhadap pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah

¹⁶ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

¹⁷ Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

sebanyak 38 responden atau sebesar 54,3 %, sedangkan yang menjawab sedang adalah sebanyak 22 responden atau sebesar 31,4 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 10 responden atau sebesar 14,3 %.

Frekuensi pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut aparat Pengadilan agama yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi¹⁸ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pengetahuan hukum masyarakat
menurut Aparat Pengadilan Agama¹⁹

No.	Tingkat pengetahuan hukum masyarakat (pemohon eksekusi)	Frekuensi	Presentase
1	Rendah	20	80
2	Sedang	3	12
3	Tidak Tahu	2	8
	Jumlah	25	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab rendah terhadap pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 20 responden atau sebesar 80 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 3 responden atau sebesar 12 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 8 %.

¹⁸ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

¹⁹ Hasil Rekapitulasi Angket Aparat Pengadilan Agama Batang

Jadi pengetahuan hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau terbukti. Itu terbukti dari jawaban ketiga responden bahwa pengetahuan hukum masyarakat rendah yaitu responden pemohon nafkah lampau sebesar 57,1 %, responden termohon sebesar 54,3 %, dan responden aparat Pengadilan agama adalah 80 %.

3. Analisis terhadap Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Frekuensi budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut pemohon yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi²⁰ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi budaya hukum masyarakat menurut pemohon
(pihak yang menang)²¹

No.	Tingkat budaya hukum masyarakat	Frekuensi	Presentase
1	Ya	20	28,6
2	Tidak	40	57,1
3	Tidak Tahu	10	14,3
	Jumlah	70	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi

²⁰ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

²¹ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 20 responden atau sebesar 28,6 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 40 responden atau sebesar 57,1 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 10 responden atau sebesar 14,3 %.

Frekuensi budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut termohon (pihak yang kalah) yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi²² adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi budaya hukum masyarakat menurut termohon
(pihak yang kalah)²³

No.	Tingkat budaya hukum masyarakat	Frekuensi	Presentase
1	Ya	20	28,6
2	Tidak	36	51,4
3	Tidak Tahu	14	20
	Jumlah	70	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 20 responden atau sebesar 28,6 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah

²² *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

²³ Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

sebanyak 36 responden atau sebesar 51,4 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 14 responden atau sebesar 20 %.

Jadi budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau cukup terbukti karena jawaban responden pemohon dan responden termohon yang menjawab ya terhadap budaya hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebesar 28,6 %.

4. Analisis terhadap Faktor Penegak Hukum (Pengetahuan Hukum Aparat Pengadilan)

Frekuensi pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut pemohon yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekuensi²⁴ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pengetahuan hukum aparat Pengadilan menurut pemohon (pihak yang menang)²⁵

No.	Tingkat pengetahuan hukum aparat Pengadilan	Frekuensi	Presentase
1	Ya	40	57,2
2	Tidak	25	35,7
3	Tidak Tahu	5	7,1
	Jumlah	70	100

²⁴ *Op.Cit*, Soerjono Soekanto, hal 268

²⁵ Hasil Rekapitulasi Angket Pemohon Eksekusi

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah sebanyak 40 responden atau sebesar 57,2 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 25 responden atau sebesar 35,7 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 7,1 %.

Frekuensi pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau menurut termohon (pihak yang kalah) yang dianalisis berdasarkan uji distribusi frekwensi²⁶ adalah sebagai berikut :

Tabel frekuensi pengetahuan hukum aparat pengadilan menurut termohon (pihak yang kalah) ²⁷

No.	Tingkat pengetahuan hukum aparat pengadilan	Frekuensi	Presentase
1	Ya	38	54,3
2	Tidak	27	38,6
3	Tidak Tahu	5	7,1
	Jumlah	70	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab ya terhadap pengetahuan hukum aparat Pengadilan sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau adalah

²⁶ *Op.Cit*, Soerjono Soekamto, hal 268

²⁷ Hasil Rekapitulasi Angket Tereksekusi

sebanyak 38 responden atau sebesar 54,3 %, sedangkan yang menjawab tidak adalah sebanyak 27 responden atau sebesar 38,6 % dan yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 7,1 %.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para penegak hukum serta para aparat pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Batang mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan putusan nafkah lampau yang cukup baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap beserta analisisnya sebagaimana telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Agama Belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pemohon eksekusi, responden tereksekusi maupun responden aparat Pengadilan agama, dimana lebih banyak menyatakan bahwa pelaksanaan nafkah lampau belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan nafkah lampau yang telah berkekuatan hukum tetap adalah :
 - a. Biaya eksekusi yang tinggi menyebabkan eksekusi tidak berjalan efektif.
 - b. Pengetahuan masyarakat pencari keadilan tentang pelaksanaan putusan nafkah lampau kurang sehingga eksekusi nafkah lampau tidak berjalan efektif.
 - c. Budaya hukum masyarakat kurang responsif terhadap putusan Pengadilan dan beranggapan bahwa kalau sudah diputus dianggap menang segala-galanya.

- d. Pengetahuan aparat penesak hukum yang belum sepenuhnya menguasai peraturan tentang eksekusi yang mengakibatkan putusan tentang eksekusi yang mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi (isolair)

B. Saran-Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, berikut ini disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada institusi yang berwenang agar biaya eksekusi diringankan agar terjangkau oleh pencari keadilan.
- b. Kepada aparat pemda setempat dan Pengadilan agar mengaktifkan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya mengenai eksekusi.
- c. Budaya-budaya hukum masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan sedapat mungkin dipertahankan.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat karunia dan pertolongan Allah SWT, yang didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Putusan Nafkah Lampau Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Agama Batang*” dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.

Sebagai manusia biasa, kesalahan dan kurang sempurnanya skripsi ini merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan, demi perbaikan selanjutnya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin, Jazakumullahu Ahsanal Jaza'.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* , Juz I, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 1976
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998
- _____, *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1990
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Permata, 1996
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, *Cet Ke-11*, 1998
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, *Cet VI*
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar* , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan Nasa'I Juz V*, Beirut: Daar al-Kitab al- Ilmiah, t.th
- Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perdata*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1987
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, *Cet. I*, 1996
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* , Semarang : CV. Al-Waah, t.th
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum* , Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Departemen P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Fauzan, Ahmad, *Himpunan undang-undang lengkap tentang badan peradilan*, Bandung: Yrama Widya, 2004
- Hadi, Abdul *Fiqh Munakahat* , Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989

Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, *Cet II*

_____, *Permasalahan dan Sita Jaminan*, Bandung: Pustaka, 1990

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pikok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Hasil rekapitulasi angket responden pemohon eksekusi dan termohon eksekusi setelah dianalisis

Hasil rekapitulasi angket responden pemohon eksekusi, termohon eksekusi dan aparat penadilan agama batang setelah dianalisis.

Instruksi Presiden RI No. 1 Th. 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2000

Kadir, M. Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Krisik, Abdul Hamid *Keluarga Sakiah* , Jakarta : Mizan al-Bayan, t.th

Manan, Abdul, *Penerapan Perundang-undangan dan Peraturan agama*, Jakarta: Al –Hikmah, 2000

Mardalis, *Metode Penelitian Sutu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Merokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1988

Muhammad bin Ismail al-Asqalani, *Subul al-Salam*, Juz. III, Semarang : Maktabah Toha Putera, t.th

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari* , Juz. IV, Indonesia Maktabah Dahlan, t.th

Mughniyah, M. Jawad, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah* , Beirut: Daar al-Ilmiah, t.th

_____, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001

- Nawawi, Hadani, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1986
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1986
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th
- _____, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, tahun 1997
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* , Jilid VII, Beirut : Daar al-Fikr, 1968
- _____, *Hak Anak-Anak Dalam Islam*, Alih Bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Soekamto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999
- Sudarto, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Prandyna Paramita, 1987
- Susantio, Retno Wulan , *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 (1)
- UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang : Aneka Ilmu, 1974
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1983

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khaerul Effendi

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 13 Juni 1985

Alamat Asal : Jl. Pemuda No. 31 Rt 4 Rw IV Kauman Batang

Pendidikan : - TK Kemala Bhayangkari 22 Batang
Lulus Tahun 1991
- SDN Kauman 1 Batang Lulus Tahun 1997
- SLTP N 4 Batang Lulus Tahun 2000
- SMU N I Batang Lulus Tahun 2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 5 juli 2008

M. Khaerul Effendi

NIM. 042111144

BIODATA

Nama	: Mukhammad Khaerul Effendi
NIM	: 042111144 / 2104144
Fakultas	: Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Jurusan	: Al - Ahwal Al -Syakhsiyah
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Batang, 13 Juni 1985
Status Perkawinan	: Belum kawin
Anak ke	: 8 (delapan)
Status dalam Keluarga	: Anak kandung
Alamat	: Jl. Pemuda No. 31 Kauman Batang
Telepon	: 085865704667
Nama Orang Tua	
a. Bapak	: Ismail
b. Ibu	: Sriwahyuningsih
Alamat Orang Tua	: Jl. Pemuda No. 31 Kauman Batang
Pekerjaan Orang Tua	
a. Bapak	: Wiraswasta
b. Ibu	: Wiraswasta